



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Dasar: Tantangan Dan Solusi Dalam Membangun Karakter Generasi Muda

Shofiyah Alfadillah<sup>1</sup>, Susila Rahmawati<sup>2</sup>, Septiana Dewi Putri<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mataram, NTB, Indonesia, [shofiyahalfadillah@gmail.com](mailto:shofiyahalfadillah@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Mataram, NTB, Indonesia, [rinirato605@gmail.com](mailto:rinirato605@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Mataram, NTB, Indonesia, [dewiputriseptiana36@gmail.com](mailto:dewiputriseptiana36@gmail.com)

**Abstrak:** Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat kemajuan bangsa dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk memutus mata rantai korupsi, diperlukan upaya preventif yang dimulai sejak dini, salah satunya yaitu melalui pendidikan anti korupsi di tingkat Sekolah Dasar. Pendidikan ini penting untuk membentuk karakter generasi muda yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Anak-anak pada usia sekolah dasar berada dalam tahap perkembangan karakter yang sangat penting, sehingga penanaman nilai-nilai antikorupsi yang dimulai sejak usia dini dapat menjadi fondasi yang kuat dalam membangun budaya antikorupsi di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait dengan tantangan dan solusi dalam penerapan pendidikan anti korupsi di tingkat dasar. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi konseptual bagi guru, pembuat kebijakan, dan pihak terkait dalam merancang pendidikan karakter yang kontekstual dan efektif. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan sumber pustaka yang relevan. Hasil kajian menunjukkan adanya tantangan seperti kurangnya pemahaman guru mengenai konsep antikorupsi, terbatasnya media dan sumber belajar, serta pengaruh budaya korupsi di lingkungan sekitar siswa. Adapun solusi yang ditawarkan meliputi pelatihan bagi guru, integrasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam berbagai mata pelajaran, serta kerja sama yang erat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam membentuk lingkungan yang mendukung pendidikan karakter antikorupsi.

**Kata Kunci:** Pendidikan Anti Korupsi, Sekolah Dasar, Usia Dini, Karakter, Integritas.

**Abstract:** Corruption is a serious problem that hinders the progress of the nation and damages the foundations of national and state life. To break the chain of corruption, preventive efforts are needed that start early, one of which is through anti-corruption education at the Elementary School level. This education is important to shape the character of the younger generation who are honest, responsible, and have high integrity. Children at elementary school age are in a very important stage of character development, so that instilling anti-corruption values that start from an early age can be a strong foundation in building an anti-corruption culture in the future. This study aims to examine the challenges and solutions in implementing anti-corruption education at the elementary level. This study is also useful as a conceptual reference for teachers, policy makers, and related parties in designing contextual and effective character education. The method used is a literature study with a descriptive-analytical approach based on relevant library sources. The results of the study indicate challenges such as a lack of teacher understanding of the concept of anti-corruption, limited media and learning resources, and the influence of a culture of corruption in the environment around students. The solutions offered include training for teachers, integration of anti-corruption values into various subjects, and close cooperation between

*schools, parents, and the community in creating an environment that supports anti-corruption character education.*

**Keywords:** *Anti-Corruption Education, Elementary School, Early Age, Character, Integrity.*

\*Correspondence Address: [shofiyahalfadillah@gmail.com](mailto:shofiyahalfadillah@gmail.com)

| Article History | Received | Revised     | Published   |
|-----------------|----------|-------------|-------------|
|                 |          | 2 June 2025 | 2 Juni 2025 |

## PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya terjadi di lingkup pemerintahan, tetapi telah merambah ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga harus melalui upaya preventif yang menyentuh akar persoalan, yaitu mentalitas dan karakter bangsa.

Pendidikan anti korupsi seharusnya ditanamkan sejak kecil dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi akan berdampak pada perkembangan psikologis siswa atau generasi muda. Melalui pendidikan mengenai anti korupsi ketika saatnya terjun ke masyarakat, anak tidak akan terpengaruh dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai anti korupsi. Serta budaya korupsi tidak akan melekat pada diri anak tersebut. Pendidikan anti korupsi menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi masa depan yang berintegritas. Namun, Upaya ini sering kali baru digalakkan pada jenjang pendidikan menengah atau perguruan tinggi. Padahal, masa anak-anak, khususnya usia Sekolah Dasar (SD), merupakan fase emas dalam pembentukan karakter. Pada tahap ini, anak lebih mudah dibentuk nilai-nilainya, termasuk nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial nilai-nilai dasar anti korupsi. Pendidikan anti korupsi di SD perlu mendapat perhatian serius sebagai investasi jangka panjang dalam upaya pemberantasan korupsi.

Permasalahan utama yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di tingkat Sekolah Dasar, dan solusi apa yang dapat ditawarkan untuk menjawab tantangan tersebut Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji secara mendalam tantangan serta solusi implementasi pendidikan anti korupsi di Sekolah Dasar. Penulis berharap studi literatur ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pendidikan karakter di sekolah dasar serta menjadi referensi bagi praktisi pendidikan, pembuat kebijakan, dan peneliti lainnya dalam mendesain pendidikan antikorupsi yang kontekstual dan efektif sejak dini.

Pendahuluan memuat latar belakang penelitian secara ringkas, padat, dan jelas; tujuan penelitian; serta teori-teori pendukung. Ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman, ukuran 12, spasi 1. Penulisan bahasa asing diketik miring (*italic*). Penulisan secara naratif, tidak perlu diberi sub-judul khusus. Termasuk dalam penulisan definisi operasional, apabila dirasa perlu, juga ditulis secara naratif. Segala bentuk rujukan yang dipakai harus dituliskan sumbernya. Penulisan sitasi atau rujukan menggunakan *body note*, yaitu dengan menuliskan nama belakang penulis dan tahun penulisan yang dituliskan di dalam kurung (Muthmainnah, 2017).

Tujuan memuat pertanyaan artikel yang harus di jelaskan pada pembahasan dan di jawab pada kesimpulan

## METODE | METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai referensi yang relevan dengan topik yang dikaji. Melalui akses terhadap buku, jurnal penelitian, dan artikel ilmiah yang berkaitan, penulis menyusun

kerangka pemikiran yang kuat untuk memahami strategi dan tantangan dalam membangun integritas, menanamkan nilai-nilai anti korupsi, serta membentuk karakter generasi penerus bangsa. Ungkapan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Adzkie Sabrina yang mengatakan bahwa studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Metode yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan menjelaskan gagasan-gagasan utama yang ditemukan dalam literatur, kemudian mengelaborasinya secara kritis melalui sumber-sumber pustaka primer dan sekunder. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menyajikan pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pendidikan dalam mencapai tujuan moral dan pembentukan karakter yang diharapkan. Selain itu, hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan integritas dan kesadaran anti korupsi sejak usia dini, khususnya di tingkat Sekolah Dasar. Metode penelitian berisi jenis penelitian, sampel dan populasi atau subjek penelitian, waktu dan tempat penelitian, instrumen, prosedur dan teknik penelitian, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitian. Bagian ini dapat dibagi menjadi beberapa sub bab, tetapi tidak perlu mencantumkan penomorannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION**

### **1. Tantangan Pendidikan Anti Korupsi**

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran mengenai pentingnya pendidikan antikorupsi di kalangan masyarakat dan pendidik itu sendiri. Banyak pendidik yang belum menyadari bahwa pendidikan antikorupsi seharusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum, bukan hanya sebagai topik tambahan atau mata pelajaran terpisah. Akibatnya, pengajaran mengenai integritas dan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan antikorupsi sering kali tidak mendapatkan porsi yang memadai dalam proses pembelajaran. Selain itu, materi pendidikan antikorupsi sering dianggap sebagai konsep teoritis yang kurang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari siswa. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi pendidik agar mereka dapat menyampaikan materi pendidikan antikorupsi dengan cara yang menarik, relevan, dan mudah dipahami oleh siswa. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga strategi pedagogis inovatif, penggunaan media pembelajaran yang interaktif, serta pendekatan berbasis nilai yang dapat membentuk karakter siswa sejak dini. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai urgensi dan metode pengajaran yang efektif, pendidikan antikorupsi akan sulit diterima oleh generasi muda dan berpotensi gagal mencapai tujuan pembentukan karakter yang berintegritas.

Tantangan lain yang cukup signifikan adalah budaya korupsi yang telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Praktik korupsi yang terjadi di sekitar mereka, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, sering kali dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan dibenarkan. Misalnya, praktik memberi uang kepada pejabat untuk mempercepat proses administrasi atau manipulasi data dalam laporan sekolah, menjadi contoh nyata bagaimana korupsi telah meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketika generasi muda terpapar pada lingkungan yang koruptif, pendidikan antikorupsi yang mereka terima dapat kehilangan efektivitasnya, atau bahkan menjadi kontraproduktif. Mereka mungkin merasa bahwa apa yang diajarkan di sekolah tidak sejalan dengan realitas yang mereka saksikan, sehingga menimbulkan sikap skeptis terhadap nilai-nilai yang diajarkan. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi perlu diterapkan secara menyeluruh, tidak hanya di dalam ruang kelas, tetapi juga dalam praktik kehidupan sosial sehari-hari. Di luar pendidikan formal, dukungan dari lingkungan sosial juga sangat diperlukan. Keterlibatan orang tua, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa generasi muda mendapatkan contoh nyata tentang penerapan nilai-nilai integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Program kolaboratif, seperti kampanye publik, kegiatan

ekstrakurikuler berbasis nilai antikorupsi, dan pembentukan komunitas peduli integritas dapat menjadi langkah strategis untuk menanamkan budaya antikorupsi secara lebih luas dan berkelanjutan.

Selain itu, tantangan dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi adalah terbatasnya sumber daya yang ada untuk menjalankan program-program pendidikan ini secara efektif. Beberapa sekolah mungkin mengalami kekurangan tenaga pengajar yang terlatih atau fasilitas yang memadai untuk memberikan pendidikan antikorupsi yang berkualitas. Bahkan di beberapa daerah, pendidikan antikorupsi belum dianggap sebagai prioritas utama dalam perencanaan kurikulum, sehingga alokasi dana dan perhatian terhadap pengembangan program ini masih minim. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pendidik melalui pelatihan yang sesuai, baik dalam bentuk pelatihan formal, lokakarya, maupun program sertifikasi yang terstruktur. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu berkolaborasi dalam menyediakan materi dan sumber daya yang dapat mendukung pengajaran nilai-nilai antikorupsi di berbagai tingkat pendidikan. Selain itu, peran sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil juga penting dalam mendukung penyediaan sumber daya pendidikan antikorupsi, misalnya melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) atau inisiatif komunitas. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi tidak hanya akan menjadi sebuah konsep, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan dan memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku peserta didik.

Sementara itu, tantangan lain dalam pendidikan antikorupsi adalah adanya panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2011 untuk perguruan tinggi. Panduan ini menjelaskan berbagai pendekatan dan metode pembelajaran yang dapat diterapkan, termasuk peran mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di lingkungan keluarga, kampus, dan masyarakat. Jika ditelusuri lebih dalam, tujuan panduan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman dan bekal kepada mahasiswa agar dapat menghindari perilaku korupsi serta mengingatkan pihak-pihak yang terlibat atau terlihat melakukan praktik korupsi. Namun, implementasi panduan ini sering kali terbatas pada institusi pendidikan yang memiliki kapasitas dan komitmen tinggi terhadap isu integritas. Banyak perguruan tinggi yang belum mengintegrasikan panduan ini secara menyeluruh ke dalam kurikulum, sehingga dampaknya belum maksimal. Orientasi ini tercermin dalam metode diskusi, pembiasaan, dan metode penilaian yang disarankan, seperti mahasiswa yang diminta untuk mengemukakan opini yang kemudian dikumpulkan dan dinilai. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya evaluasi berkala terhadap penerapan panduan tersebut serta peningkatan dukungan dari institusi pendidikan tinggi agar pendidikan antikorupsi benar-benar menjadi bagian integral dari proses pembelajaran dan pembentukan karakter mahasiswa. Hal ini juga dapat diperkuat melalui kerja sama antara universitas, lembaga antikorupsi, serta komunitas mahasiswa yang aktif dalam advokasi integritas.

## **2. Solusi Untuk Mengatasi Tantangan Pendidikan Anti Korupsi**

Pertama, pendidikan antikorupsi merupakan bagian integral dari pendidikan karakter yang menekankan pembentukan pribadi yang berintegritas melalui penerapan sembilan prinsip antikorupsi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu: jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli. Kesembilan nilai ini tidak hanya menjadi acuan normatif, tetapi juga merupakan fondasi moral yang harus ditanamkan sejak dini kepada peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum yang efektif harus mencakup semua elemen yang dapat membantu mencapai tujuan tersebut secara holistik, mulai dari perencanaan pembelajaran, metode pengajaran, hingga evaluasi berbasis karakter. Untuk mendukung upaya pencegahan korupsi secara sistemik, semua aktivitas pendidikan antikorupsi juga perlu diatur secara resmi melalui peraturan teknis, seperti kode etik, tata tertib sekolah, hingga kebijakan institusi yang mendukung perilaku antikorupsi. Aturan-aturan ini harus tidak hanya bersifat formalitas,

tetapi juga dipahami, disetujui, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan—mulai dari siswa, guru, tenaga kependidikan, hingga manajemen sekolah dan orang tua siswa. Dengan adanya regulasi yang jelas, proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi akan lebih terarah dan berdampak nyata dalam pembentukan budaya sekolah yang bersih dan berintegritas.

Kedua, sebagai figur yang berperan layaknya orang tua di lingkungan sekolah, guru memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa di semua tingkat pendidikan. Peran guru tidak hanya sebatas pengajar mata pelajaran, tetapi juga sebagai pembina moral yang dapat menyentuh aspek afektif dan sosial siswa. Pendidikan antikorupsi dapat berfungsi sebagai media untuk menyebarkan nilai-nilai positif sejak usia dini, ketika karakter anak masih dalam tahap pembentukan dan sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Setelah siswa memahami nilai-nilai tersebut, diharapkan mereka tidak hanya menghafalnya, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari—baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan Masyarakat. Dalam implementasinya, terdapat empat pendekatan utama yang dapat digunakan oleh pendidik untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi, yaitu: pertama, mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam berbagai mata pelajaran melalui konteks yang relevan; kedua, melibatkan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan empati dan kepedulian sosial; ketiga, menerapkan nilai antikorupsi melalui tata tertib yang mencerminkan budaya disiplin dan keadilan; dan keempat, menciptakan lingkungan pembelajaran yang memotivasi siswa untuk berpikir kritis dan bertindak etis. Pendekatan-pendekatan ini saling melengkapi dan dapat disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan peserta didik di masing-masing satuan pendidikan.

Ketiga, salah satu pendekatan yang sangat relevan dan efektif di era digital adalah dengan memanfaatkan media sosial, teknologi, dan platform digital yang sudah akrab digunakan oleh generasi muda. Generasi digital cenderung lebih responsif terhadap konten visual dan interaktif daripada pembelajaran konvensional berbasis teks. Oleh karena itu, media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan platform pembelajaran daring dapat digunakan untuk menyampaikan materi pendidikan antikorupsi secara lebih menarik, kreatif, dan mudah dicerna. Misalnya, pembuatan video pendek edukatif, infografis tentang dampak korupsi, atau kampanye daring bertema integritas bisa menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan antikorupsi. Pendekatan digital ini tidak hanya mampu menjangkau audiens yang lebih luas, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam waktu dan tempat, sehingga pendidikan antikorupsi tidak terbatas hanya pada jam pelajaran formal. Selain itu, penggunaan teknologi dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran secara aktif, membangun rasa kepemilikan terhadap nilai-nilai yang diajarkan, serta memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu inovasi penting dalam strategi penyebarluasan pendidikan antikorupsi di kalangan generasi muda.

Keempat, selain memanfaatkan media sosial, strategi lain yang tidak kalah penting adalah menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang antikorupsi. Keterlibatan OMS dapat memperkaya pendekatan pendidikan antikorupsi karena mereka seringkali memiliki metode pendekatan berbasis komunitas, perspektif lapangan, dan data empiris yang kuat. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat berkolaborasi dengan organisasi-organisasi ini untuk menyelenggarakan pelatihan, workshop, atau seminar yang bersifat praktis dan aplikatif. Kegiatan-kegiatan ini dapat diikuti oleh siswa, guru, dan masyarakat umum sebagai bagian dari pendidikan non-formal yang mendukung penguatan nilai integritas di luar kelas. Dengan menghadirkan narasumber yang relevan, studi kasus nyata, serta simulasi peran, peserta akan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan berdampak. Selain itu, sinergi antara sektor pendidikan dan masyarakat sipil dapat membentuk jaringan advokasi yang lebih

luas dalam mendorong terciptanya lingkungan sosial yang bersih dari korupsi. Dengan adanya berbagai kegiatan pelatihan dan diskusi ini, pendidikan antikorupsi akan lebih mudah diinternalisasi oleh peserta didik dan masyarakat luas serta memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan perilaku sosial yang berorientasi pada kejujuran dan tanggung jawab.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pendidikan antikorupsi memerlukan dukungan kuat dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, media, dan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan antikorupsi bukanlah upaya yang bisa berdiri sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi sinergis untuk dapat dilaksanakan secara efektif dan berdampak luas. Melalui penerapan strategi yang tepat dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia, pendidikan antikorupsi dapat menjadi pilar penting dalam membentuk generasi muda yang berkarakter kuat dan berkomitmen tinggi terhadap nilai-nilai integritas. Dengan demikian, pendidikan ini bukan hanya menjadi alat pencegahan terhadap praktik korupsi, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam beberapa konteks, penyampaian materi melalui ilustrasi visual yang lengkap, infografik, atau simulasi interaktif dapat lebih efektif dibandingkan hanya narasi tertulis, karena mampu menghadirkan pemahaman yang lebih konkret dan membekas dalam ingatan peserta didik.

## KESIMPULAN | CONCLUSION

Pendidikan anti korupsi di tingkat Sekolah Dasar merupakan langkah strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Masa usia dini adalah periode emas dalam pembentukan nilai-nilai moral, sehingga penanaman nilai antikorupsi sejak SD menjadi fondasi penting untuk mencegah praktik korupsi di masa depan. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya pemahaman pendidik, keterbatasan media pembelajaran, dan lingkungan sosial yang belum mendukung. Meskipun demikian, tantangan tersebut dapat diatasi melalui solusi yang terarah, seperti pelatihan guru, penguatan kurikulum berbasis nilai antikorupsi, pemanfaatan teknologi, dan sinergi antara sekolah, keluarga, serta masyarakat.

## REFERENSI | REFERENCE

- Agustina, R. S., Fajarani, M. A., Pratama, H. S., Ramadhon, R. A., & Bekti, A. A. (2024). *Revolusi Mental : Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Membangun Moralitas Dan Etika Yang Baik Pada Generasi Z*. 2(1).
- Amelia, R., Nur, P., Truvadi, L. A., & Agustina, R. T. (2023). *Peran Pendidikan Pancasila dalam Membentuk Karakter Bangsa Indonesia : Tinjauan dan Implikasi*. 1(4), 501–510.
- Daffa, M., Setiawan, D., Zahra, S., Darmawan, I. T., Putra, R., Antoni, H., Jl, A., & Box, P. P. O. (2025). *Peran Pendidikan Pancasila dalam Menanamkan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Mengatasi Dekadensi Moral di Kalangan Generasi-Z pada Era Digital Universitas Pakuan Bogor , Indonesia pengamalan nilai-nilai Pancasila . Lingkungan yang kondusif , yang ditandai dengan gotong*. 1.
- David, M., Arifin, Z., Romadhoni, D., Sistem, P., Kapal, K., Malahayati, P. P., & David, M. (2023). *Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi : Menjawab Tantangan Moral Generasi Z*. 2(3), 10–14. <https://doi.org/10.30596/jcositte.v1i1.xxxx>
- Fierna, M., Lusie, J., Faniya, P., Helna, P., Krisnaufal, S., Pamulang, U., & Banten, P. (2023). *Peran Pendidikan Pancasila Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik di Sekolah*. 7(2), 1983–1988.
- Furnamasari, Y. F., Usman, D. A., Zahra, F. R., Nisa, K., Handayani, N. A., Khotimah, R. N., & Fajar, R. N. (2024). *Peran Pendidikan Pancasila Dalam Membentuk Etika Dan Moral Siswa Di Era Digital*. 8(5), 13–20.
- Gunawan, R. Z., & Najicha, F. U. (2022). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun*. 6(1), 422–427.
- Negeri, M. (2024). *No Title*. 09, 634–647.

- Hariani, R., Kurniawansyah, E., & Sumardi, L. (2023). *Peran Guru PPKn Dalam Menumbuh Kembangkan Karakter Disiplin dan Kejujuran Siswa Kls VIII di SMPN 4 Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(3), 5235-5253.
- Kasim, N. A., & Kurniawansyah, E. (2024). *Strategi Guru Ppkn Dalam Mengembangkan Karakter Disiplin Siswa Di Mts Negeri 1 Mataram. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(1), 634-647.
- Sesilia, E., Satya, M., Dwi, D., Dwi, M., Nisak, N., Nabila, S., & Bangsa, K. (2024). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 1*,